

Adi Sasono: Demokratisasi Tak Bisa Dielakkan



Nama Adi Sasono tidak bisa dipisahkan dari perkembangan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Indonesia. Selain dikenal kritis, tokoh yang pernah mengagumi teori-teori pembangunan alternatif, khususnya Teori Dependensia ini, juga dikenal tegas mempertahankan prinsip-prinsipnya —yang memihak kepentingan rakyat. Belakangan, melalui CIDES, lembaga yang dianggap sebagai *think-tank* ICMI, Adi kembali mengintroduksi sejumlah gagasan alternatif, seperti pentingnya dikembangkan ekonomi kerakyatan dan sebagainya. Bagaimana pandangan-pandangan Adi mengenai LSM yang dulu secara intens digeluti, mengenai ICMI yang —konon— telah menimbulkan kecemburuan politik, mengenai demokrasi dan keadilan sosial? Berikut hasil wawancara redaktur *UQ*, Dewi Nurjulianti yang ditulis bersama Arief Subhan khusus untuk rubrik Pakar kali ini.

Ketika menjawab surat pribadi Nurcholish Madjid —yang membicarakan masalah hubungan antara Islam dan negara— Muhammad Roem, salah seorang bekas Perdana Menteri pada masa Orde Lama dan cendekiawan Islam terkemuka, menulis, “Saya benar-benar ingat, bahwa saya menulis di Majalah *Mimbar* (waktu itu terbit di Bandung, di bawah asuhan cucu saya Adi Sasono, waktu itu Ketua HMI Cabang Bandung, dan mengucapkan: Selamat datang serta selamat berjuang.”) Waktu Nurcholish Madjid mengemukakan gagasan pembaruannya yang sangat kontroversial pada era 1970-an itu, Adi memang mengundang Pak Roem —yang *nota bene* adalah kakeknya sendiri— untuk memberikan respon di majalah yang diasuhnya, *Mimbar*.

Cerita di atas tidak dimaksudkan sebagai penonjolan figur Adi sebagai cucu Pak Roem. Tetapi justru melalui cerita di atas, keterlibatan Adi dalam gerakan-gerakan Islam di Indonesia dapat dilihat dan diposisikan dengan jelas. Jika belakangan ini, Adi menekuni CIDES (*Center for Information and Development Studies*), sebuah lembaga studi dan penelitian yang dicetuskan oleh ICMI, secara *intens* —bahkan menduduki kursi direktur— kiranya bukan sesuatu yang mengherankan. Melalui CIDES, atau lebih luas lagi ICMI, inilah Adi mengartikulasikan dirinya dengan sejumlah gagasan alternatif, yang apabila ditelusuri secara jauh akan bermuara pada semangat keislamannya. Sesuatu yang sejak muda memang sudah menjadi obsesinya.

Manajagi Dunia Aktivis

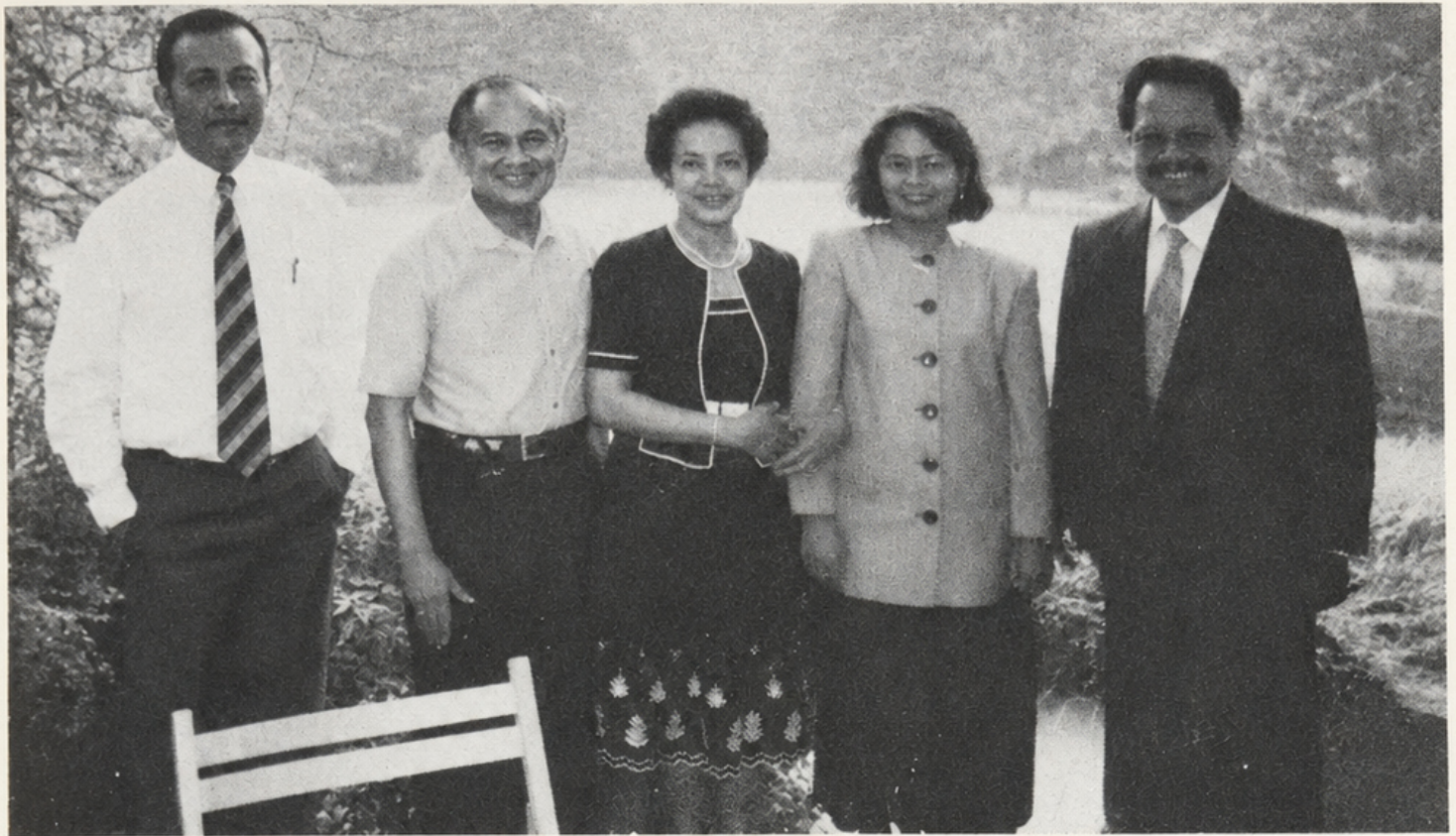
Adi Sasono dilahirkan di Pekalongan pada 16 Februari 1943 sebagai anak kedua dari delapan bersaudara. Ayahnya, Adnan Martowiredjo —yang berasal dari Kudus— dan ibunya, Sasinah Danuwihardjo adalah aktivis Muhammadiyah. Ayahnya aktif di PKO (Penolong Kesengsaraan Oemat), bagian dari Muhammadiyah yang mengurus anak-anak yatim-piatu, panti orang buta, dan sebagainya. Sedangkan ibunya, tercatat sebagai pengurus Aisyiah —sebuah organisasi wanita di bawah Muhammadiyah— cabang Pekalongan. Pengalaman yang mengesankan waktu itu, demikian pengakuan Adi, adalah ketika ia sering diajak ayahnya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, “Pengalaman inilah yang seringkali muncul dan mempengaruhi saya pada saat harus menentu-

kan pilihan-pilihan dalam hidup,” katanya.

Pekalongan, yang terletak di pantai utara, juga merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya adalah santri. Di daerah ini, pada masanya, mulai berkembang pesat industri batik sehingga autentik Pekalongan” pernah demikian populer. Tetapi, kembangan semacam ini pernah melahirkan pula adanya hubungan yang saling pengaruh antara dunia keagamaan kaum santri dengan perilaku ekonomi mereka. Orang seperti Clifford Geertz misalnya meyakini adanya hubungan itu. Rupanya, apa yang oleh Max Weber disebut sebagai “semangat kapitalisme” nampak berlaku di kalangan santri Jawa, maka memiliki semangat ekonomi dan etika kerja, suai dengan iklim perkotaan yang rasional, dan telah merintis jalan ke arah terbentuknya etika borjuis sejati. Tak heran jika secara umum, tingkat ekonomi masyarakat di wilayah ini sangat baik, bahkan boleh dikatakan makmur. Realitas ini —khususnya dalam konteks masyarakat Pekalongan— tidak bisa dilepaskan dari hadirnya Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam yang beraliran reformis. Muhammadiyah tampaknya memang berhasil meletakkan landasan etis bagi keberlangsungan proses modernisasi di Pekalongan.

Dengan latar belakang sosial dan budaya semacam itu, tak heran jika kondisi sosial-ekonomi keluarga Adi —pada masa itu— boleh dikatakan berkecukupan. Meskipun demikian, bukan berarti keluarga Adi hidup dalam gelimang kemewahan. Hal ini misalnya tercermin dalam ucara khitanan Adi sendiri. “Tidak seperti anak-anak lain, waktu itu oleh ayah saya diikuti khitanan massal bersama sekitar enam puluh anak-anak yatim yang dibina oleh Muhammadiyah,” kata Adi mengenang.

Adi menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di kota kelahirannya. Selanjutnya, ketika ia diterima di ITB, Adi hijrah ke Bandung. Di kota kembang inilah kiprah Adi sebagai aktivis dimulai. Semasa mahasiswa, ia aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan baik intra maupun ekstra-universiter. Ia pernah duduk sebagai Ketua Umum Dema (Dewan Mahasiswa ITB periode 1965-1966, setelah sebelumnya menjabat sebagai Sekjen. Sedangkan di lingkungan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), sebuah organisasi Islam yang pada waktu itu sangat berpengaruh, Adi pernah menduduki jabatan Ketua Cabang Bandung. Ketika menjabat sebagai Ketua HMI Cabang Bandung inilah, Adi menerbitkan



Adi Soemo bersama B.J. Habibie dan isteri, Marwah Daud Ibrahim, serta A. Watik Pratiknya.

majalah *Mimbar* yang disebutkan di atas.

Di tengah-tengah kiprahnya sebagai aktivis mahasiswa itulah, Adi bertemu Maria, mojang periang yang kelak menjadi pasangan hidupnya. Waktu itu, Adi tengah menjabat Ketua Dema ITB, sedangkan Maria aktif di Departemen Keputrian Dema Unpad, Bandung. Selain itu, keduanya juga aktif di IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia). Aktivitas di IPMI inilah yang sering mempertemukan mereka. “Maria berasal dari Bandung. Saya menjadi bisa lebih dekat mengenalnya, karena kebetulan ketua Dema Unpad juga berasal dari Pekalongan. Setelah dua tahun menjalin kasih, kami memutuskan untuk menikah. Dan sewaktu kami menikah, kami masih menjadi aktivis di kampus masing-masing,” ungkapnya. Adi menikah pada usia 24 tahun. Kini, pasangan Adi dan Maria dikaruniai lima orang anak, tiga laki-laki dan dua perempuan.

Selepas dari ITB, Adi bekerja sebagai eksekutif PT Kramayudha, sebuah perusahaan yang relatif besar pada waktu itu. “Sewaktu masih menjadi eksekutif, saya menyukai berbagai jenis olah raga, karena relatif masih mempunyai banyak waktu dan penghasilan yang cukup tinggi. Olah raga yang saya tekuni dulu adalah berkuda, tenis, dan jogging. Golf, saya

baru belajar,” katanya. Posisi Adi sebagai General Manager, mengantarkannya ke negeri Belanda guna menyiapkan perencanaan dan pembangunan pabrik Building Elektroda selama beberapa bulan. Meskipun telah berkecimpung dalam dunia usaha—yang murni berorientasi laba—Adi tetap *concern* dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Dua belas tahun Adi berkiprah di dunia usaha, dan di tengah-tengah kiprahnya itulah Adi—bersama teman-temannya—sempat mendirikan *Himpunan Masyarakat Indonesia untuk Kemanusiaan*, sebuah organisasi yang memberi perhatian terhadap berbagai problema sosial yang ada dalam masyarakat.

Salah satu *concern* organisasi ini adalah berbagai kemalangan yang dialami oleh para keluarga tapol PKI. Dalam pandangan Adi, perlakuan terhadap keluarga tapol itu cenderung tidak adil. “Karena itu, kita tidak bisa membiarkan hal itu terus terjadi. Ajaran Islam yang paling pokok adalah keadilan, yang berarti kita harus menentang perlakuan tidak adil kepada siapa pun. Meskipun barangkali orang yang tidak mendapatkan keadilan itu berbeda agama, berbeda keyakinan politik, berbeda ras dan sebagainya. Sebab, jika kita membiarkan suatu perlakuan yang tidak adil terjadi kepada mereka, karena mereka ber-

beda dengan kita, apabila hal itu menimpa kelompok kita, maka kita tidak mempunyai hak moral untuk menolak ketidakadilan itu. Sebab, kita telah menerapkan standar ganda. Jadi, terlepas dari perbedaan keyakinan politik dengan para tapol PKI, kita harus membela hak-hak yang sah dari para tapol itu dalam rangka negara hukum Indonesia,” kata Adi mengungkapkan pandangannya.

LSM sebagai Jalan Perjuangan

Berdasarkan perhatiannya yang demikian besar terhadap masalah-masalah sosial itulah, pada 1976 Adi diminta oleh M. Dawam Rahardjo untuk menjadi Ketua LSP (Lembaga Studi Pembangunan). Dua tahun kemudian, Adi diangkat sebagai Direktur Pelaksana LSP. Pemilihan Adi sebagai Direktur Pelaksana ini menjadi penting dalam perjalanan hidup Adi. Sebab, di sinilah Adi dihadapkan pada dua pilihan sulit. Tetap menggeluti dunia bisnis —yang memberi kompensasi materi relatif berkecukupan— atau memilih jalan kehidupan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), yang tanpa prospek ekonomi sama sekali. “Bahkan saya harus mencari dan sendiri untuk menghidupi berbagai kegiatan LSP,” katanya.

Dihadapkan pada situasi seperti ini, Adi menetapkan pilihannya untuk aktif di LSM. Pilihan ini, selain dilatarbelakangi oleh aktivitas dan idealisme yang kental semasa mahasiswa, juga dilandasi oleh pandangan Adi mengenai hidup itu sendiri. Adi merasa tidak cocok jika hidup ini hanya diisi dengan memikirkan aspek materi saja. Selanjutnya, Adi keluar dari PT Kramayudha. “Ibaratnya, jika kita belum membakar kapal, maka hati ini merasa belum bulat. Sebab, nantinya akan tetap mendua. Saya mulai aktif di LSM dengan satu tekad bekerja sambil belajar, karena LSM adalah sebuah dunia yang sangat kontras dengan dunia yang saya geluti sebelumnya,” katanya. Sejak saat itulah nama Adi tidak bisa dipisahkan dengan aktivitas dan perkembangan LSM di Indonesia.

Dalam pandangan Adi, perkembangan LSM di Indonesia paling tidak telah melewati empat generasi. Tentu saja, semuanya mempunyai asumsi dan pendekatan yang berbeda-beda terhadap masalah-masalah yang ada di Indonesia, sesuai dengan perkembangan teori pengembangan masyarakat itu sendiri. LSM generasi pertama, atau generasi tahun 1960-an, sifat kegiatannya hanya semata-mata didasarkan pada kerja keaifman. Tak lebih dari kedermawanan untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Berdasarkan caranya yang masih bersifat karitatif ini, demikian Adi menjelaskan, LSM pada waktu itu hanya memikirkan bantuan, tanpa pernah bertanya mengapa dan apa yang menyebabkan mereka kekurangan. Dari inilah kemudian muncul kritik bahwa memberikan



Adi Sasono dalam seminar HAM dan Pembangunan.

bantuan yang bersifat karitatif seperti itu justru akan menciptakan ketergantungan. Sebab, masyarakat tidak dirangsang untuk kreatif, sebaliknya mereka diajarkan untuk “menunggu bantuan”.

Kondisi di atas, diperbaiki oleh generasi kedua, atau generasi awal tahun 1970-an. Generasi ini mulai mempertanyakan sebab-sebab kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami oleh masyarakat “akar rumput”. Menurut generasi ini, kunci dasar penyelesaian masalahnya adalah keswadayaan. “Karena itulah, pada masa ini, tumbuh pendekatan yang mendorong proses pengembangan kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang memberikan latihan-latihan dengan suatu pendirian bahwa lebih baik memberikan kail daripada ikan. Sebab, dengan memberi kail dan mengajarkan kepada masyarakat miskin

untuk mengail, diharapkan mereka bisa ter-
tolong untuk seterusnya,” ungkap Adi.

Selanjutnya, pada akhir tahun 1970-an, muncul generasi ketiga. Pada masa inilah Adi mengawali kiprahnya di dunia LSM. Generasi ini mulai melakukan pengkajian kebijakan (*policy*) untuk melihat asumsi-asumsi perencanaan pembangunan. Diyakini oleh generasi ini bahwa akar kemiskinan terlebih dahulu harus dianalisis sebelum melakukan kegiatan. Mereka juga tidak hanya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di tingkat lokal. Asumsinya, seperti dijelaskan

Adi, kalau hanya melakukan kegiatan di tingkat lokal, maka tidak akan mempunyai dampak yang bersifat makro. Indonesia memiliki 66.000 desa, jika LSM hanya menangani proyek di 100-200 desa saja, secara makro tidak akan banyak artinya. Lagi pula, orang yang ditolong karena kemiskinan, tanpa dilihat sebab-sebabnya, bisa saja jatuh miskin kembali karena ada persaingan yang tidak seimbang antara pemodal besar dan rakyat. “Sehingga pada akhir 1970-an beberapa LSM, termasuk LSP yang saya pimpin, mengadakan pengkajian-pengkajian kebijakan dan mengemukakan adanya reorientasi dasar-dasar pemikiran pembangunan. Selanjutnya, generasi ini juga menyusun agenda yang bersifat multilevel, yaitu upaya pemberdayaan di tingkat bawah dan upaya advokasi kebijakan di tingkat pengambil keputusan,” kata Adi.

Pada generasi ini jugalah mulai disadari pentingnya peningkatan kompetensi teknis para aktivis LSM. “Sebab, sebagai contoh, jika LSM menangani sektor perkembangan kota, ia harus mampu berbicara pada tingkat perencanaan kota dengan dinas tata kota atau Bapeda. Tanpa itu, akan sulit melakukan advokasi mengenai masalah tata ruang kota, yang



Adi Sasono bersama keluarga.

menjadi dasar mengapa pedagang kaki lima itu selalu dianggap mengganggu lalu lintas,” kata Adi menjelaskan. Bagi Adi, kunci keberhasilan suatu advokasi terletak pada kompetensi teknis bidang atau sektor di mana kegiatan advokasi itu dilakukan. Sebagai contoh adalah kegiatan-kegiatan LSP sendiri, yang bergerak dalam sektor *urban development*. Prestasi LSP, antara lain, memperoleh penghargaan Aga Khan Award untuk *An Outstanding Contribution in Urban Development*. Proyek yang merupakan kerjasama dengan Pemda Samarinda, Kalimantan Timur itu bertemakan “Membangun Tanpa Menggusur.” Selain itu, LSP juga memperoleh penghargaan dari UNESCO bagi proyek pemukiman bagi para buruh di Bandung. Proyek-proyek sejenis juga coba dikembangkan di sejumlah kota, tapi karena harus berhadapan dengan struktur kekuasaan, dalam 10 tahun hanya berhasil dikembangkan di 6 kota, yaitu Balikpapan, Medan, Jombang dan sebagainya — masih dalam bentuk rintisan.

Pada generasi berikutnya, yaitu generasi 1980-an dan 1990-an, demikian menurut Adi, sofistikasi metodenya semakin berkembang. Format kegiatannya pun semakin beranekaragam. Salah satu format yang

cukup menonjol dalam generasi ini —bersamaan dengan maraknya jargon demokratisasi— adalah munculnya “LSM Advokasi” yang ditandai dengan semakin kerasnya sikap protes di kalangan sejumlah LSM, terutama berkaitan dengan nasib buruh, masalah tanah dan sebagainya. Salah satu yang menonjol adalah Yayasan Pijar yang muncul pada 1983 dan sering dipandang sebagai “pusat gerakan.” Bahkan —seperti ditulis *Tempo*, 15 Januari 1994— “Sampai-sampai ada seorang pengamat secara berkelakar menyebut para aktivis yayasan ini sebagai biro demo.”

Akan tetapi, tahun 1993 juga mencatat menguatnya peranan LSM dalam “model pembangunan masyarakat.” Penguatan ini terutama terjadi dalam aksesnya terhadap pengambilan keputusan pembangunan, terutama terkait dengan alokasi sumber daya pembangunan bagi kelompok miskin dan kepentingan rakyat jelata. Sebagian orang menganggap ini sebagai “kooptasi”, tapi bagi sebagian yang lain merupakan bukti makin luasnya agenda pembangunan resmi untuk mengoreksi kesenjangan sosial, dan makin terintegrasinya kepentingan di tanah air yang selama ini diperjuangkan LSM ke dalam program resmi.

Namun dari semua itu, menurut Adi, dapat ditemukan benang merahnya, yaitu pemihakan pada rakyat kecil. Dalam hal ini, LSM memikul risiko ekonomi dan politik untuk memihak rakyat. Karena itulah sebenarnya pemihakan LSM adalah pada kepentingan bangsa. Berdasarkan pandangan ini, Adi dengan tegas menolak tuduhan bahwa LSM itu tidak nasionalis dan suka menjelek-jelekkan nama Indonesia di luar negeri. Peristiwa yang dipicu oleh Konferensi INGI (*Inter NGO Conference for Indonesia*) di Brussel 1989 ini memang mengandung makna yang lebih berdimensi politik dari keberadaan LSM. Begitu “gawat” peristiwa tersebut dari sudut kepentingan resmi, hingga masuk dalam agenda Sidang Kabinet RI. Proses selanjutnya —dapat diduga— LSM semakin dicurigai. Ditambah dengan sejumlah konperensi lainnya, pada akhirnya di penghujung



Adi Sasono dalam suasana santai di rumah.

1994 pemerintah mengeluarkan Keppres yang mengatur tentang LSM.

Dari sekitar 4000-an LSM di Indonesia, demikian Adi meneruskan argumentasinya, yang mempunyai hubungan dan kontak dengan luar negeri hanya belasan. Dalam pandangan Adi, kalangan LSM itu bukan-benar membangun akar ekonomi dan politiknya di dalam negeri. Kalau pun ada yang membangun hubungan dengan luar negeri untuk tujuan pendanaan dan informasi, demikian menurut Adi, itu tidak serta merta dapat dituduh tidak nasionalis. Itu karena mereka yang bergiat dalam bidang yang mampeka itu sulit mendapat dukungan dari dalam negeri,” kata Adi. Pemerintah sendiri pada umumnya masih bersikap *apriori*, dan tidak mencoba melakukan dialog. Meskipun pada akhirnya pemerintah sendiri menurut desakan LSM, seperti dalam bidang lingkungan hidup, HAM, dan sejumlah masalah informal seperti perburuhan dan sebagainya. “Bahkan sekarang dalam GBHN 1983 istilah ekonomi rakyat yang dulu hanya menjadi bahasan LSM, secara resmi menjadi dokumen negara,” katanya. Selain itu, informasi negatif mengenai Indonesia yang sampai ke luar negeri, tidak mesti bersumber dari LSM. Sebab, sekarang ini jalur informasi sudah terbuka lebar. Lagi pula, lanjut Adi, ada suatu pandangan bahwa kepentingan pembelaan kemanusiaan itu bersifat universal. “Kalau kita membela perjuangan bangsa Palestina atau Bosnia, maka kita

hingga keberatan kalau ada orang yang mengangkat masalah ketidakadilan di Tanjungpriok, Lampung, Aceh dan Timur Timur. Seharusnya pemerintah tidak melulu bersikap defensif, tapi korektif dan konstruktif,” ungkap Adi. Dari situ tampak bahwa sikap pemerintah terhadap LSM memang terkesan bermusuhan. Di satu pihak masih berusaha menekan kegiatan yang berbau politik praktis dari LSM. Di pihak lain, untuk kegiatan yang lebih bersifat mendukung “pembangunan,” pemerintah lebih terbuka dan akomodatif.

Aktivitas Adi di LSM, tidak terbatas di LSP saja. Pada 1978, bersama M. Dawam Rahardjo, M. Amin Aziz, Abdillah Thoha, dan AM. Saefuddin, Adi mendirikan Pusat Pengembangan Agribisnis (PPA). Ide awal pendirian PPA itu sendiri berasal dari Dawam Rahardjo. Waktu itu, Adi—bersama Dawam—berpendapat, potensi pertanian di wilayah Indonesia yang demikian besar, belum secara sistematis di dorong pertumbuhannya menuju pengembangan masyarakat petani yang lebih maju. Petani selalu hidup dengan tingkat perolehan yang kecil sekali. Ini, selain karena faktor rendahnya produktivitas, juga disebabkan oleh faktor harga yang kurang memihak petani. Karena itu, demikian kata Adi, jawabannya selain peningkatan produktivitas adalah memasukkan manajemen modern yang semuanya tercakup dalam konsep agribisnis dan agroindustri. Menurut Adi, kalau ini dapat dilakukan dengan basis perantara masyarakat banyak maka nilai tambah itu akan jatuh ke tangan petani. Untuk itu secara sistematis perlu dilakukan penelitian dan pengembangannya.

“Waktu itu yang mencarikan dukungan finansial adalah Pak Abdillah Toha. Saya dan Mas Dawam kemudian mencari tema dari IPB yang dipandang kompeten. Kami berdua memang tidak punya latar belakang pendidikan pertanian. Lalu kami bertanya kepada seseorang yang berada di lingkungan Pak Natsir dan diberitahu bahwa ada seorang Doktor bernama AM. Saefuddin yang cukup dekat dengan Pak Natsir yang barangkali bisa membantu ide-ide ini. Maka suatu hari saya dengan Mas Dawam berangkat ke Bogor untuk mencari rumah beliau, tanpa tahu persis dimana rumahnya. Tapi akhirnya ber-

Meskipun secara gigih memperjuangkan demokrasi, tapi tetap harus diingat bahwa ICMI itu bukan institusi politik, karenanya jika ada yang mengatakan bahwa ICMI tidak kritis terhadap isu-isu politis adalah wajar. Komitmen ICMI, adalah berkemauan bal-bal mendasar.

temu juga dan datang berdua untuk mengenalkan diri, karena kami belum kenal. Kemudian kami menceritakan ide-idenya dan karena waktu itu hari sudah hampir maghrib maka dilanjutkan dengan shalat maghrib berjamaah. Meski baru saling mengenal, tapi karena beliau orang yang dekat dengan Pak Natsir, kami beranggapan beliau juga orang baik. Sehingga kami serahkan saja kepada Pak AM. Saefuddin untuk mencari orang yang bisa menjadi direktur pelaksanaannya. Soal pembiayaan dan sebagainya itu tanggungjawab kami

—akan dicarikan. Kemudian waktu itu ada Ph.D. yang baru pulang dari Amerika bernama Muhammad Amin Aziz, yang pada rapat-rapat berikutnya diundang. Dari sanalah kemudian dikembangkan, dan setelah itu kami menyerahkan semua hal kepada ahlinya,” ungkap Adi mengenai latar belakang PPA yang sekarang merupakan salah satu LSM yang cukup berhasil mengembangkan diri.

Mengintroduksi Pembangunan Alternatif

Puncak prestasi Adi dalam dunia LSM adalah ketika ia pada 1988-1993 diangkat sebagai Ketua *South-east Asia Forum for Alternative Development* (SEAFDA). SEAFDA dibentuk ketika Adi dan Dawam Rahardjo terlibat dalam program penelitian PBB yang berpusat di Tokyo. Selama beberapa tahun Adi bekerja sebagai peneliti di PBB, yang secara bersama-sama melakukan proses penelitian, seminar, dan dialog-dialog antar kawasan di dunia, mengenai perspektif pembangunan Asia (*Asian Development Perspective*). Ketika program ini selesai, para alumninya—dari Universitas Philipina, Universitas Malaya Malaysia, Universitas Chulalongkorn Bangkok, Adi dari LSPa dan Mas Dawam dari LP3ES—melembagakan kegiatan ini. Maka pada 1986 didirikanlah SEAFDA. Kebijakannya adalah memakai pendekatan alternatif dalam pembangunan.

“Sudah jelas bahwa pendekatan pembangunan yang konvensional itu tidak menjawab problem kepincangan sosial dan pemberdayaan rakyat untuk demokratisasi dalam bidang ekonomi dan politik karena tekanan yang berlebihan dalam sektor ekonomi

Lebih dari itu, posisi pemain-pemain ekonomi itu sendiri berbeda sehingga ada kecepatan bertumbuh yang berbeda pula. Akibatnya ada gejala pemusatan kekuasaan asset produktif di tangan sekelompok kecil anggota masyarakat. Inilah fenomena umum yang ada di Asia Tenggara. Di sinilah SEAFDA merasa perlu mengintroduisir satu format pembangunan alternatif,” kata Adi. Selanjutnya Adi menegaskan, “Karena kita banyak sekali memiliki perbedaan, selain adanya persamaan di dalam sejarah pembangunan ekonomi, maka kita bisa saling belajar.”

Melalui SEAFDA, Adi —dan teman-temannya— juga menolak asumsi bahwa solusi pembangunan harus datang dari Eropa dan Amerika. “Kita harus mengajukan pembangunan alternatif dari pengalaman kesejarahan kita sendiri dalam konteks sosial budaya kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi konsumen dari teori yang dipaksakan dari luar yang kemudian tidak berhasil menjadi proses emansipatoris,” kata Adi mengemukakan tekadnya. Modal untuk mengembangkan pembangunan alternatif adalah pengalaman dari organisasi yang bergerak di akar rumput. Pendeknya, harus belajar dari sukses-sukses pembangunan di tingkat akar rumput yang bisa dibawa ke tingkat kebijakan makro. “Misalnya saya bergerak dalam bidang *city’s planning* dan *urban development*. Tesis saya adalah, membangun suatu perencanaan kota dunia ketiga yang menciptakan pembangunan tanpa penggusuran. Bukan suatu teori yang mudah seperti dalam seminar-seminar. Tetapi bagaimana masuk di lapangan dan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan yang anti-rakyat dengan birokrasi yang seringkali kurang bisa menjabarkan makna dari amanat GBHN. Singkatnya, contoh yang di Samarinda itu dapat dijalankan,” katanya.

Di sisi lain, menurut Adi, model ini juga memberikan inspirasi mengenai bagaimana gerakan koperasi bisa mengambil alih pembangunan pusat usaha di perkotaan, dan program perumahan murah melalui koperasi —yang sekarang baru mencapai 36 ribu dalam tempo satu dasawarsa. Meskipun ini merupakan prestasi yang lumayan, tapi menurut Adi, tetap tidak punya pengaruh yang signifikan di tingkat makro. Sebab, setiap tahun minimal dibutuhkan 900 ribu buah rumah baru. Meskipun demikian, pengalaman-pengalaman ini perlu diangkat sebagai contoh untuk dijadikan suatu kebijakan alternatif. “Karena itu, antara cendekiawan dengan aktivis LSM itu harus bersatu, bukan hanya dalam kerjasama tapi juga

dalam metode praksisnya. Tidak hanya sekadar melakukan seminar-seminar saja seperti yang dilakukan oleh cendekiawan lain yang menjadikan seminar hanya sebagai *academic exercise*. Sebab pada ketidakberdayaan melawan struktur politik, para cendekiawan cenderung menganggap itu sebagai puncak prestasi. Yang terjadi mereka kemudian sangat peduli karena disibukkan untuk menyiapkan seminar berikutnya,” tuturnya. Adi pernah pula menjadi di Sekjen Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) yang berpusat di Bandung yang pada 1991 sempat mendapat hadiah Upakarti dari Presiden untuk pengembangan industri kecil.

ICMI dan Keadilan Sosial

Dalam perbincangan informal —sambil berse-lakar— Adi sering mengungkapkan bahwa dirinya bukanlah ICMI “darah biru.” Melalui ungkapan ini, Adi hanya ingin menegaskan bahwa ia tidak termasuk salah satu pendiri ICMI. Pada waktu “pertemuan Malang” tahun 1990 lalu, Adi bahkan tidak hadir. Waktu itu, ia sedang memimpin pertemuan SEAFDA di Bangkok. Oleh karena itu, demikian pengakuan Adi, keterlibatannya di ICMI boleh dikatakan agak kebetulan. “Saya ditarik oleh beberapa teman ITB yang terlebih dahulu sudah masuk struktur ICMI,” katanya. Tapi hal ini tidak berarti Adi sama sekali tak peduli terhadap pentingnya organisasi semacam ICMI. Adi bahkan tercatat pernah ikut memprakarsai pertemuan cendekiawan Muslim yang diselenggarakan oleh sejumlah LSM —dengan ISAF sebagai pelaksananya— pada 26-28 Desember 1984 di gedung PKBI Jakarta. Dalam pertemuan itu, Adi bahkan menyumbangkan tulisannya yang berjudul “Usaha Pengembangan Emansipasi Sosial: Beberapa Catatan”. Dalam tulisan itu, Adi menghadapkan egalitarianisme Islam —yang bersumber dari doktrin *tawhîd*— terhadap realitas masyarakat Indonesia. Menurutnya, masyarakat Indonesia masih mencerminkan situasi yang non-emansipatoris. Struktur masyarakatnya masih melambangkan pelapisan sosial yang tajam, yang berwujud kesenjangan dalam kekuasaan ekonomi dan politik. Kepada cendekiawan Muslim, Adi mengharapkan komitmen sosialnya sebagai Muslim untuk tidak bersikap netral dan bebas nilai. Terakhir, Adi menekankan perlunya kaum cendekiawan mengambil prakarsa guna mendorong pengembangan masyarakat sebagai pra-

Katanya, "Kalau ada sesuatu yang sifatnya tidak seimbang, misalnya penguasaan ekonomi oleh sekelompok kecil anggota masyarakat—sekarang ada Rp 178 triliun kredit yang tersedia, dan hanya kurang dari 20% yang jatuh ke tangan masyarakat pribumi—ini tidak adil dan tidak sehat untuk kehidupan berbangsa. Sebab, ini merupakan bibit perpecahan akibat kesenjangan kaya dan miskin. Sekarang ada kesadaran bahwa itu tidak benar, dan kesadaran itu bukan semata-mata karena ICMI, tapi merupakan kesadaran kolektif bangsa. Kalau ada sektor masyarakat tersisih, dan itu adalah sektor mayoritas, jika dibiarkan akan menjadi tidak sehat. Seharusnya mereka tidak usah khawatir, jika memang berpihak pada keadilan dan demokrasi, Kalau mereka takut, saya tak tahu alasannya apa."

Selanjutnya, Adi mengatakan, "Jika ada yang berpendapat bahwa adalah bahaya jika kekuatan Islam berkuasa di negeri ini sebelum demokrasi dan HAM ditegakkan, saya berpendapat bahwa semoga pendapat semacam ini adalah sebuah kekhilafan. Karena ada dua kesalahan elementer. *Pertama*, Islam merupakan agama dari 90% masyarakat Indonesia. Ide apapun, harus mendapat pengokohan sepanjang tidak bertentangan dengan Islam. Sebab, kesediaan orang untuk berdemokrasi dan menegakkan hak-hak azasi manusia harus berdasar dari ajaran agama. Ini kalau kita ingin demokrasi dan HAM itu menjadi sebuah keyakinan kolektif. Dalam keyakinan saya HAM dan demokrasi adalah refleksi dari pandangan sosial Islam dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*, dalam sejarah baik tingkat dunia maupun Indonesia, kaum Muslim selalu jadi korban bangsa dan agama yang menjadi penguasa kolonial. Dalam sejarah kontemporer, kita juga melihat orang Islam justru menjadi korban pelanggaran hak azasi manusia seperti yang terjadi di Bosnia, Mindanao, Palestina dan sebagainya. Jadi, yang mengambil sikap dikotomi antara Islam dengan hak azasi dan demokrasi, dari segi teologi jelas keliru, dan dari segi historis tidak berdasar."

Masih dalam konteks menjawab kekhawatiran-kekhawatiran itu, Adi berkata, "Saya justru akan bertanya, mengapa kekuatan Islam yang mayoritas itu malah dimarginalkan. Harusnya kalau mereka demokrat sejati, mereka akan mempersoalkan mengapa selama 25 tahun dalam bidang ekonomi orang Islam dimarginalkan. Dalam bidang politik orang Islam diteror dengan isu negara Islam, komando ji-

yasa dari pihak tertentu untuk menciptakan ketakutan Islam dan membuat dikotomi antara Islam dan Pancasila. Adalah tidak logis jika 90% dari kita mengatakan kita harus dimarginalkan atau disingkirkan. Itu adalah pikiran-pikiran fasis. Saya khawatir, pemikiran itu hanya lahir dari orang yang hanya ingin menghapuskan Islam, yaitu orang yang ingin mencegah ditegakkan hak-hak istimewanya dalam bidang politik dan ekonomi yang selama ini dinikmatinya serta yang mereka takut pada demokrasi." Atas dasar itu, Adi menganggap bahwa proses yang terjadi sekarang ini bukan Islamisasi, yang sedang terjadi itu adalah Islam demokratisasi—dan itu belum terjadi, masih dalam proses ke arah sana.

Meskipun secara gigih memperjuangkan demokrasi, tapi tetap harus diingat bahwa ICMI ini bukan institusi politik, karenanya jika ada yang mengatakan bahwa ICMI tidak kritis terhadap isu-isu politik, itu adalah wajar. Karena ICMI tidak bisa terjebak pada isu-isu politik praktis keseharian yang tersebar dan menimbulkan kontroversi di masyarakat. Komitmen ICMI, kalau itu menyangkut politik adalah bagaimana hal-hal mendasar yang berkaitan dengan peralihan kehidupan bangsa dalam jangka panjang. Kalau ditanya pilihan antara demokrasi dan atau Islam, demokrasi sudah pasti ICMI akan memilih perjuangan demokrasi. Itu diwujudkan melalui kegiatan CIDES dalam bentuk pengkajian, dialog, penggunaan tentang alternatif-alternatif yang diperlukan pada pengambil kebijakan. Ini, menurut Adi, akan lebih konstruktif untuk membangun sebuah pengkajian yang lebih mendasar, membangun kebersamaan dan menghindarkan suatu bentuk solusi yang sifatnya *hit and run*. Jadi ICMI akan memilih suatu porsi, tidak akan menjawab isu-isu harian yang muncul dalam bidang politik. Tapi tentang komitmen ICMI kepada HAM dan demokrasi tidak ada yang bisa membantah, bahkan dalam Silaknas terakhir 1992 itu hal itu ditegaskan kembali oleh Ketua Umum ICMI. Selain itu, seminar pertama yang dilaksanakan oleh ICMI adalah seminar tentang HAM yang dilaksanakan pada Desember 1992. Demikian pula penerbitan pertama yang dikeluarkan oleh CIDES dengan jurnalnya yang bernama *Afkar*, juga tentang HAM

Dewi Nurjulianti dan Arief Subhan

Catatan pengelola arsip

Artikel: Adi Sasono: Demokratisasi Tak Bisa Dielakkan

Penulis: Dewi Nurjulianti dan Arief Subhan

Sumber: Ulumul Qur'an, No. 1, Vol. VI, 1995, rubrik Pakar.

Dokumen ini menyatukan sembilan halaman versi baca bersih yang sebelumnya ditampilkan kepada pemilik koleksi. Halaman pertama adalah halaman pembuka (nomor 111 diperkirakan dari urutan), diikuti 112-118 dan 120. Halaman 119 belum tersedia.

Halaman bersih merupakan reproduksi olahan dengan bantuan AI. Angka tahun pada kaki halaman telah dikoreksi mengikuti foto sumber: 1995. Karena pengolahan generatif dapat mengubah detail huruf dan foto, versi baca ini perlu dibandingkan dengan sumber untuk kutipan dan pemeriksaan rinci. Foto asli disertakan sebagai sembilan lampiran berkas tertanam dalam PDF ini.

Catatan ini merupakan tambahan pengelola Pustaka KBA13 Academy dan bukan bagian dari artikel majalah asli.